

“Kalau kepedulian kita berhenti di layar, apa bedanya solidaritas dengan menonton tragedi orang lain?”

Diskusi terbuka. Boleh kamu setuju, boleh kamu bantah — yang penting kamu pikir.

"Solidaritas atau Sekadar Konsumsi Duka"

Pekan ini linimasa nyaris tak bisa dibuka tanpa menabrak kabar konflik: eskalasi antara Iran dan Amerika Serikat menyusul insiden di Selat Hormuz, korban anak yang terus bertambah di Gaza meski gencatan senjata katanya sudah berlaku, larangan azan di sebuah masjid bersejarah di Palestina, hingga kabar dalam negeri tentang warga sipil yang ditembak di Intan Jaya dan pilot yang dibunuh dalam pembakaran pesawat di Yahukimo. Reaksi kolektif berjalan

cepat dan seragam: unggah, tandai, marah, lalu scroll ke konten berikutnya. Pola ini memunculkan pertanyaan yang tidak nyaman — apakah yang tengah berlangsung benar-benar solidaritas, ataukah sebetulnya konsumsi duka, di mana penderitaan orang lain menjadi bahan bakar emosi sesaat yang habis begitu jempol berpindah?

Lensa pertama datang dari psikologi digital. Fenomena "compassion fatigue" dan "slacktivism" menjelaskan bahwa keterlibatan berbiaya rendah — sekali klik, sekali bagikan — memberi ilusi telah berbuat sesuatu, sehingga justru menurunkan dorongan untuk tindakan yang lebih mahal. Implikasinya: semakin viral sebuah tragedi, belum tentu semakin besar bantuan nyata yang mengalir. Tetapi celah lensa ini jelas: ia berisiko meremehkan fungsi kesadaran kolektif. Tanpa viralitas, banyak isu tak akan pernah masuk agenda publik sama sekali. Pertanyaan yang muncul: pada titik mana kesadaran berhenti menjadi awal tindakan dan mulai menjadi penggantinya?

Lensa kedua ditawarkan ekonomi-politik. Konflik geopolitik pekan ini digerakkan oleh kepentingan energi, senjata, dan pengaruh — insiden di jalur minyak dunia bukan kebetulan. Dari sudut ini, solidaritas individual tampak nyaris tak berarti di hadapan struktur raksasa yang menentukan siapa hidup dan siapa mati. Implikasinya cenderung fatalistik: untuk apa peduli kalau keputusan ada di ruang-ruang yang tak terjangkau warga biasa? Celah lensa ini terletak pada asumsinya bahwa hanya perubahan struktural yang berarti. Ia lupa bahwa keputusan konsumen yang terkoordinasi, tekanan opini, dan bantuan kemanusiaan yang tersalur tetap mengubah nasib manusia konkret. Pertanyaannya: apakah ketidakberdayaan struktural boleh dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawab personal?

Lensa ketiga adalah sosiologi identitas. Solidaritas kerap dibangun atas dasar kedekatan — sesama iman, sesama bangsa, sesama ras. Ini menjelaskan mengapa satu tragedi meledak di percakapan sementara

tragedi setara di tempat lain nyaris sunyi. Implikasinya tidak selalu buruk: kedekatan memang mempermudah empati dan mobilisasi. Tetapi celahnya berbahaya. Solidaritas yang murni berbasis identitas mudah tergelincir menjadi tebang pilih — peduli pada korban "kita" sambil dingin pada korban "mereka", bahkan mudah berubah menjadi kebencian pada kelompok lawan. Prinsip *qist* dan *'adl* dalam Islam justru mengoreksi ini; QS. Al-Maaida ayat 8 mengingatkan bahwa kebencian pada suatu kaum tidak boleh mendorong seseorang berlaku tidak adil. Pertanyaannya: mungkinkah membangun solidaritas yang berpihak pada yang terzalimi tanpa harus mendehumanisasi pihak yang dilawan?

Lensa keempat bertumpu pada etika teologis tentang persaudaraan sebagai kewajiban, bukan perasaan. Dalam kerangka ini, menolong yang tertindas berstatus *fardh kifayah* — kewajiban kolektif yang gugur dari sebagian bila cukup orang menanganinya, tetapi menjadi dosa bersama bila terbengkalai. Rumusan ini memindahkan solidaritas dari ranah sentimen ke ranah tanggung jawab yang terukur. Implikasinya menuntut: bukan seberapa sedih perasaan, melainkan seberapa nyata kontribusi. Celah lensa ini adalah risiko formalisme — menggugurkan kewajiban secara minimal lalu merasa selesai. Namun justru di sinilah keempat lensa bertemu: kesadaran (lensa satu) tanpa struktur pemahaman (lensa dua), tanpa keadilan lintas-identitas (lensa tiga), dan tanpa kerangka kewajiban (lensa empat) akan selalu kembali menjadi konsumsi duka belaka.

Lalu apa yang bisa dilakukan mahasiswa pekan ini, konkret? Di kos, sisihkan nominal tetap — sekecil apa pun — untuk lembaga kemanusiaan yang laporannya transparan, dan jadikan rutin, bukan reaktif. Di kelas atau organisasi, alih-alih membuat unggahan marah kesekian, susun satu materi ringkas yang menjernihkan kabar simpang-siur soal konflik agar teman-teman tidak termakan hoaks. Praktikkan verifikasi: sebelum membagikan klaim tentang siapa menyerang siapa, cek apakah kabar itu punya sumber jelas atau sekadar potongan lama yang diputar ulang. Dalam diskusi kampus, latih diri membedakan

mengecam kezaliman dari membenci satu bangsa — keduanya sering dicampur dan menghasilkan retorika yang justru merusak. Dan bila ada teman yang berbeda pandangan tentang cara terbaik menolong, jaga agar perbedaan itu tidak memutuskan relasi; barisan yang pecah adalah kemenangan bagi pihak yang ingin melemahkan kepedulian itu sendiri.

Yang penting bukan menemukan rumus solidaritas yang sempurna, melainkan menyadari bahwa setiap bentuk kepedulian yang berhenti di tingkat emosi akan selalu menyisakan hutang tindakan. Lensa apa pun yang dipilih sebagai pintu masuk — psikologis, ekonomi, sosiologis, atau teologis — masing-masing menutup satu celah sekaligus membuka celah yang lain. Barangkali kejujuran pertama yang perlu diakui adalah bahwa menonton duka itu mudah, dan hanya berhenti menjadi konsumsi ketika ia berubah menjadi sesuatu yang berbiaya.

| Pertanyaan

Q · 01

Bukannya ini murni masalah sistem geopolitik? Apa yang bisa diubah oleh satu mahasiswa dengan uang jajan pas-pasan?

A

Sebagian benar — struktur besar memang di luar jangkauan individu. Tetapi menjadikan itu alasan untuk tidak berbuat apa-apa adalah lompatan logika. Bantuan kemanusiaan yang tersalur, tekanan konsumen yang terkoordinasi, dan narasi yang jernih tetap mengubah nasib manusia konkret. Skala kecil bukan berarti nol.

Q · 02

Kenapa harus agama yang dibawa-bawa? Bukankah solidaritas kemanusiaan bisa berdiri sendiri tanpa dalil?

A

Bisa, dan itu sah. Tetapi bagi yang beragama, kerangka kewajiban kolektif memberi sesuatu yang sulit disediakan sentimen kemanusiaan murni: ukuran yang mengikat. Ia mengubah "kalau sempat" menjadi "harus ada yang menangani". Kerangka itu memperkuat, bukan menyaingi, nalar kemanusiaan.

Q · 03

Bukankah menyerukan solidaritas untuk satu konflik sambil diam pada konflik lain justru bukti tebang pilih yang kalian kritik sendiri?

A

Kritik ini valid dan menusuk. Konsistensi memang ujian terberat solidaritas. Jawaban jujurnya: kedekatan wajar memicu perhatian lebih dulu, tetapi prinsip keadilan menuntut kepedulian itu diperluas, bukan dijadikan pembenaran untuk mengabaikan korban lain. Tebang pilih bukan alasan berhenti peduli; ia alasan untuk memperluas.

Q · 04

Kalau boikot cuma bikin pedagang kecil rugi, bukankah itu justru menzalimi pihak yang tak bersalah?

A

Ini pertimbangan nyata yang tidak boleh diabaikan. Boikot yang etis menasar aktor besar, bukan tetangga yang menjual sisa stok untuk menyambung hidup. Kalau sebuah tindakan solidaritas malah menciptakan korban baru di lingkaran terdekat, ia gagal pada premisnya sendiri: menolak kezaliman, bukan memindahkannya.

Q · 05

Saya skeptis pada semua narasi konflik — media sama-sama punya agenda. Bukankah paling rasional bersikap netral dan tidak ikut campur?

A

Skeptisisme pada narasi itu sehat, dan verifikasi memang wajib. Tetapi netralitas terhadap fakta penderitaan berbeda dari netralitas terhadap propaganda. Meragukan klaim yang belum terverifikasi itu rasional; menutup mata pada korban yang nyata dengan dalih "semua bias" adalah bentuk lain dari melarikan diri dari tanggung jawab.